LAPORAN MONITORING KINERJA
TRIWULAN I
TAHUN 2026

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Paser

Tanah Grogot

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan..... 2
B. Maksud dan Tujuan..... 2
C. Tugas Pokok dan Fungsi..... 3
D. Struktur Organisasi..... 4
E. Sumber Daya Manusia..... 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja..... 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2026 10
B. Sasaran Capaian Kinerja I..... 11
C. Sasaran Capaian Kinerja II..... 14
D. Sasaran Capaian Kinerja III..... 16
E. Sasaran Capaian Kinerja IV..... 19
F. Realisasi Anggaran..... 22

BAB IV PENUTUP 25

LAMPIRAN..... 26

BAB I
PENDALUHULUAN

A. Dasar pembentukan Organisasi

Peran Badan Kesbangpol di masyarakat adalah memelihara dan meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa melalui pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan kerukunan antar elemen masyarakat. Kesbangpol juga memfasilitasi dialog dan pemberdayaan masyarakat, melakukan pendidikan politik agar masyarakat aktif berpartisipasi, dan menjaga kewaspadaan terhadap paham radikal. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser adalah lembaga strategis di pemda dalam menjaga dan memelihara stabilitas politik, kerukunan, dan wawasan kebangsaan masyarakat, terutama menjelang dan selama Pemilu. Dengan struktur organisasi yang mengedepankan sekretariat, bidang Kesatuan Bangsa, Politik & Ormas, dan dukungan untuk forum keamanan sosial seperti FPK, FKUB dan FKDM, badan ini aktif menyelenggarakan berbagai program edukatif, sosialisatif, dan fasilitatif di wilayah Kabupaten Paser.

Tugas dan Fungsi Badan kesbangpol di bentuk berdasarkan peraturan bupati Paser nomor 28 Tahun 2023 tentang susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan kinerja triwulan I Badan Kesatuan Bangsa dan Kab. Paser 2026 adalah:

1. Sebagai bentuk pertanggung jawaban secara tertulis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser selaku penerima kewenangan dan Pengguna Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
2. Memberikan gambaran dan informasi mengenahi tingkat pencapaian target triwulan yang telah ditetapkan oleh masing-masing bagian / bidang untuk mewujudkan visi,misi,tujuan dan sasaran yang menjadi tanggung jawab dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Adapun tujuan dari pada penyusunan laporan triwulan I Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2026 adalah :

1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja badan Kesbang dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2026;
2. Memberikan laporan bagi pengambilan kebijakan dan keputusan peningkatan kinerja perencanaan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Paser.
3. Terlaksananya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program / kegiatan kerja secara afesien, efektif dan responsive serta tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sesuai dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Paser, mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser mempunyai tugas dan fungsi Sebagai berikut :

A. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi :

a) Pengoordinasian penyusunan rencana strategis Badan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
b) Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Badan berdasarkan rencana strategis Badan sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
c) Pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d) Pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Badan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Badan;
e) Penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
f) Perumusan kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
g) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
h) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
i) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Badan guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan.

j) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k) Pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku;

l) Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Badan;

m) Pembinaan Jabatan Fungsional pada Badan sesuai dengan kewenangan yang diberikan;

n) Pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan Jabatan Fungsional dan pelaksanapada Badan;

o) Pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;

p) Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

q) Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

r) Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah; dan

s) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariatmempunyai tugas merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur, serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Badan. Selain melaksanakan tugas sekretariat juga menyelenggarakan fungsi:

a) Pemberian petunjuk penyusunan rencana strategis Badan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja.

b) Pemberian petunjuk penyusunan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Badan berdasarkan rencana strategis Badan sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;

c) Perumusan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d) Pemberian petunjuk penyusunan kegiatan dan anggaran Badan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Badan;

e) Pengoordinasian penyusunan dan mensosialisasikanstandar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Badan;

f) Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Badan;

g) Pelaksanaan administrasi keuangan Badan;

h) Pelaksanaan administrasi barang milik Daerah pada Badan;

i) Pelaksanaan administrasi kepegawaian Badan;

j) Pelaksanaan administrasi umumBadan;

k) Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah;

l) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah;

m) Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusanpemerintahan Daerah;

n) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan;

o) Pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Badan;

p) fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana pada Badan;

q) fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Badan;

r) Pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internalserta pengelolaan informasi dan dokumentasi;

s) Pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Badan;

t) Pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester danlaporan keuangan tahunan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

u) Pemberian petunjuk penyiapan bahan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku;

v) Pemberian petunjuk penyiapan bahan pembinaan Jabatan Fungsional pada Badan;

w) Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan Jabatan Fungsional dan pelaksana pada Badan;

x) Pemberian petunjuk penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;

y) Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

z) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan pada Badan;

aa) Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

bb) Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan sebagai bahan masukan dalamPengambilan Kebijakan dibidang Kesekretariatan

C. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.

Dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi:

a) Perencanaan program Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Badan;

b) Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c) Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan

d) Pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

e) Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;

f) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi. Sosial, Budaya, Agama;

g) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;

h) Pelaksanaan penyusunan program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

i) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan

j) Pelaksanaan pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

k) Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

l) Pelaksanaan penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;

m) Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;

n) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;

o) Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;

p) Pelaksanaan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat aka n pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

q) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;

r) Pelaksanaa penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

s) Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya, Agama; dan

t) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi:

a) Perencanaan program Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Badan;

b) Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c) Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

d) Pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Politik Dalam egeri dan Organisasi Kemasyarakatan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

e) Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;

f) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;

g) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;

h) Pelaksanaan penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, etika budaya politik,peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah;

i) Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum /pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah;

j) Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah;

k) Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah;

l) Pelaksanaan penyusunan program kerja dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;

m) Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;

n) Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas. evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;

o) Pelaksanaan koordinasi dibidang pendaftaranormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;

p) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan;

q) Pelaksanaan penilaian tugasbawaha n melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

r) Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Sadan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan

s) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpinoleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan P e rumusan kebijakan, memberi petunjukpelaksanaan kebijakan mengevaluasidan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik juga menyelenggarakan fungsi:

a) Perencanaan program Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Badan;

b) Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c) Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

d) Pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

e) Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

f) Pelaksanaan kebijakan diBidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

g) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

h) Pelaksanaan Penyusunan Program Kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;

i) Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penangana konflik di Daerah;

j) Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;

k) Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;

l) Pelaksanaan forum kordinasi pimpinan Daerah;

m) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan;

n) Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

o) Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan

p) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tentuan peraturan perundang-undangan

D. Struktur Organisasi

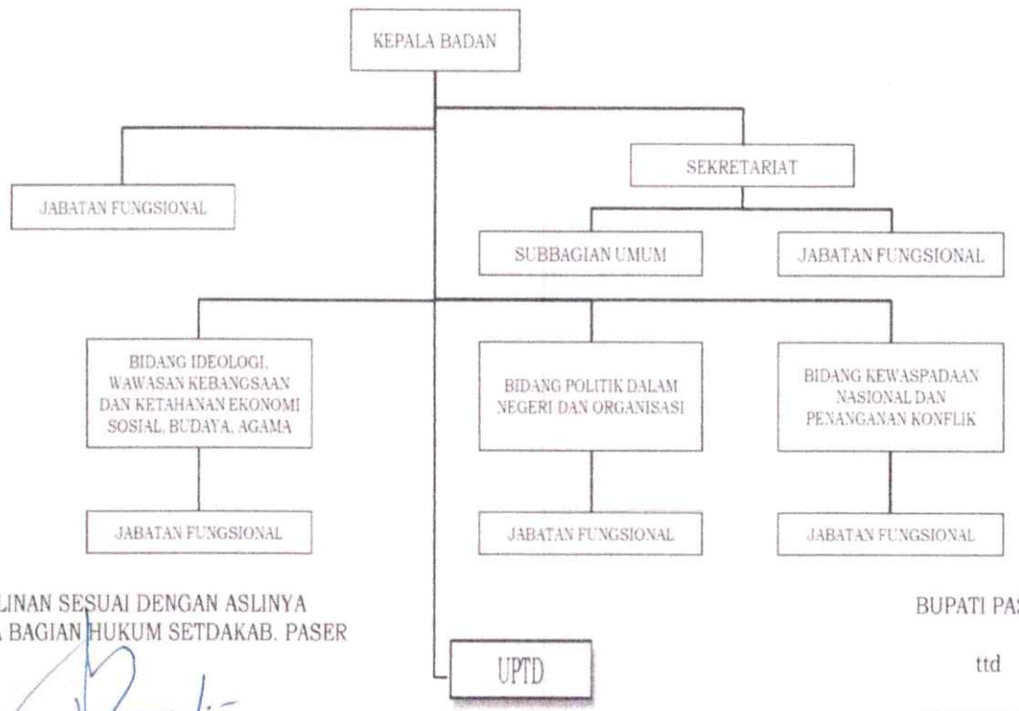
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER

ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

E. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di klasifikasikan ke dalam tabel 2.1. Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S2	7
2	S1	18
3	D III	1
4	SLTA	8
5	SLTP	1
	Total	35

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2026

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1 di atas, tingkat pendidikan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik cukup memadai. Tingkat pendidikan aparatur yang paling banyak adalah berpendidikan sarjana atau Strata 1 (S1), yaitu sebanyak 18 orang (51.42 %). Selanjutnya kedua terbanyak adalah tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 8 Orang (22.86 %). Sedangkan ketiga terbanyak adalah berpendidikan Pasca Sarjana atau Strata 2 (S2), yaitu sebanyak 7 orang (20.0 %). Diploma 3 sebanyak 1 Orang (2,85 %) Dan berpendidikan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1 Orang (2.85 %). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak memiliki Pegawai yang latar belakang Pendidikan Strata 3, Diploma 4, dan Sekolah Dasar.

Dari jumlah pegawai sebanyak 35 orang ini kemudian dientukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan.Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi Jabatan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	22
2	Perempuan	13
	Total	35

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2025

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	2
3	Eselon IV	1
4	JF	4
5	Pelaksana	27
	Total	35

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2026

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Kepemimpinan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Diklat PIM TK II	1
2	Diklat PIM TK III	2
3	Diklat PIM TK IV	3
4	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	1
5	Pelatihan Kepemipinan Pengawas (PKP)	1
	Total	8

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2026

juga merupakan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3

PERJANJIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASER TAHUN 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DATA THN 2025	TARGET KINERJA THN 2025	TARGET KERJA TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan stabilitas dan harmoni kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara	Meningkatkan penanganan Konflik Ipoleksosbud di daerah	Persentase konflik Ipoleksosbud yang dapat ditangani.	100 %	100 %	25 %	50%	75%	100 %
	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat kepuasan masyarakat atas Layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	75 %	80 %	-	80%	-	80 %
		Nilai Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsadan Politik	76,60	76,70	-	-	76,70	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

Peranggungjawaban kinerja yang tepat dan terukur merupakan media untuk mengetahui kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2026, disajikan dalam bentuk perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasinya. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser 2026 sebagai berikut :

Tabel 4

MEMBANDINGKAN TARGET DAN REALISASI KINERJA
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026

NO	SASARAN strategis	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan penanganan Konflik Ipoleksosbud di daerah	Persentase konflik Ipoleksosbud yang dapat ditangani.	25	o	0
2	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan	Tingkat kepuasan masyarakat atas Layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	80 %	0	0
		Nilai Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsadan Politik	76,70%	0	0

Untuk lebih jelas dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN I YAITU MENINGKATKAN PENANGAN KONFLIK IPOLEKSOSBUD DIDAERAH
TERDIRI DARI :

1. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Tabel 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	25 %	0	0

Dalam mencapai sasaran I didukung dengan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan meliputi 1 kegiatan dengan Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran sebagai berikut yaitu :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan Capaian Kinerja sebesar 0. % dan realisasi Anggaran sebersar Rp. 43.849.318,-

Dari target capaian kinerja sasaran I Nilai realisasi Capaian kinerja dan Realisasi Anggarannya belum mencaapai Target hal ini disebabkan Kegiatan baru akan dilaksankan pada Triwulan II, III dan ke IV tetapi kinerja pendukung lainya telah dilaksanakan.

2 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Tabel 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pendidikan politik pada masyarakat dan kader partai politik	1.6 %	0	0

Dalam mencapai sasaran I didukung dengan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembags Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik meliputi 1 kegiatan dengan Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran sebagai berikut yaitu :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningktan Demokrasi , Fasilitasu kelembagaan Pemerintahan , perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala daerah serta Pemantauan Situasi di Daerah dengan Capaian Kinerja sebesar 0 % dan realisasi Anggaran sebersar Rp 167.770.435,-

Dari target capaian kinerja sasaran I Nilai realisasi Capaian kinerja dan Realisasi Anggarannya belum mencaapai Target hal ini disebabkan Kegiatan baru akan dilaksankan pada Triwulan II, III dan ke IV tetapi kinerja pendukung lainya telah dilaksanakan.

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Tabel 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Organiasi Kemasya rakatan yang aktif.	15 %	0	0.08

Dalam mencapai sasaran I didukung dengan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan meliputi 1 kegiatan dengan Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran sebagai berikut yaitu :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdaayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan dengan Capaian Kinerja sebesar 0 % dan realisasi Anggaran sebersar Rp. 14.116.928,-

Dari target capaian kinerja sasaran I Nilai realisasi Capaian kinerja dan Realisasi Anggarannya belum mencaapai Target hal ini disebabkan Kegiatan baru akan dilaksankan pada Triwulan II, III dan ke IV tetapi kinerja pendukung lainya telah dilaksanakan.

4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEM - BANGAN KETA HANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Tabel 4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Presentase kebijakan bidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditindaklanjuti	25 %	0	0

Dalam mencapai sasaran V didukung dengan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya meliputi 1 kegiatan dengan Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran sebagai berikut yaitu :

1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya dengan Capaian Kinerja sebesar 0. % dan realisasi Anggaran sebesar Rp.1.920.000,-

Dari target capaian kinerja sasaran V Nilai realisasi Capaian kinerja dan Realisasi Anggarannya belum mencapai Target hal ini disebabkan Kegiatan baru akan dilaksankan pada Triwulan II, III dan ke IV tetapi kinerja pendukung lainya telah dilaksanakan.

5 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

Tabel 4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial	25 %	0	0

Dalam mencapai sasaran VI didukung dengan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kwalitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial meliputi 1 kegiatan dengan Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran sebagai berikut yaitu :

1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Kewaspadaan Nasional dsn Penanganan Konflik Sosial dengan Capaian Kinerja sebesar 0s % dan realisasi Anggaran sebesar Rp158300.963,-

Dari target capaian kinerja sasaran VI Nilai realisasi Capaian kinerja dan Realisasi Anggarannya belum mencapai Target hal ini disebabkan Kegiatan baru akan dilaksankan pada Triwulan II, III dan ke IV tetapi kinerja pendukung lainya telah dilaksanakan.

SASARAN II YAITU MENINGKAT KUALITAS LAYANAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TERDIRI DARI

6 PROGRAM **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB. / KOTA**

Tabel 6
Pengukuran Kinerja sasaran I Meningkatnya Nilai Kinerja Manajemen Internal
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Badan esatuan Bangsa dan Politik Serta Meningkatnya Nilai Kinerja Manajemen Internal	**80 %**	- 15,80	07,61
Nilai Evaluasi SAKIP dan AKIP	76,70	-	-

Dalam mencapai sasaran I didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kabu[aten / Kota meliputi 8 kegiatan dengan Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran sebagai berikut yaitu

1. Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah dengan Capaian Kinerja 0,08 % dan realisasi Anggaran sebesar Rp.14.862.309,-

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Capaian kinerja 7,32 % dan realisasi Anggarannya sebesar Rp1.350936.844

,-

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah degan Capaian Kinerja sebesar 0 % dan realisasi Anggaran sebesar Rp. 0 ,-

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah degan Capaian Kinerja sebesar 0.20 % dan realisasi Anggaran sebesar Rp. 36.122.830,-
5. Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 % dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 0,-
6. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi Capaian kinerja sebesar 0.02 % dan realisasi Anggaran sebesar Rp 2.812.780,-.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerntahan Daerah dengan realisasi caapaian kinerja sebesar 0 % dan realisasi Anggaran sebesar Rp. 0 .-

Dari target capaian kinerja sasaran II ada Kegiatan yang Nilai realisasi Capaian kinerja sebesar 07,41 dan Realisasi Anggarannya sebesar 1.404.764.763,- 0 hal ini disebabkan bahwa pelaksanaan Kegiatan baru untuk Kegiatan Administrasi Keungan Perangkat Daersh meliputi Gaji dan Tunjangn ASN (PNS dan PPPK) dan Kegiatam Perencanaan , Penganggaran dan Ealuasi Perangkat Daerah dan Kegiatan yang lain akan dilaksanakan padaTriwulan II,III dan IV tetapi kinerja pendukung lainya telah dilaksanakan.

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 7
Realisasi Anggaran

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	Capaian (%)
1	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	2.845.031.139	43.849.318,-	2.801.181.821,-	0,24 %
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik melalui Pendidian Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningktan Demokrasi , Fasilitasu kelembagaan Pemerintahan , perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala daerah serta Pemantauan Situasi di Daerah	5.388.072.705,-	167.77-.435,-	5.220.303.270 ,-	0,91%
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdaayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan	102.913.186	14.582.704,-	88.330.482,-	0,08 %
4	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan	90.000.00,-	1.920.000-	88.080.000,-	0,01 %

		Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya				
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kwalitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Kewaspadaan Nasional dsn Penanganan Konflik Sosial	1.143.897.369,-	158.300.964	985.596.405,-	0,86%
6	Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kabu[aten / Kota	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	168.476.422,-	68.057.908,-	100.418.514-	40,40 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.700.042.269,-	1.676.549.777,-	5.023.492.492,-	25,22 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	405.294.420,-	120.631.402,-	284.663.018,-	29,74 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	405.294.420,-	120.631.402,-	284.663.018,-	29,74 %
		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.999.185,-	6.646.740	20.352.445	24,62 %
		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerntahan Daerah	62.446.466,-	-	62.446.466,-	0 %

Dari realisasi Keuangan dapat disimpulkan bahwa dalam Pagu Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Paser pada Tahun 2026 sebesar Rp. 16.461.870.179,- sampai dengan Triwulan I telah terealisasi sebesar Rp.1.791.186.184,- artinya 9,70 % Realisasi Capaian Kinerja belum mencapai target yang ditentukan

BAB IV
P E N U T U P

Demikian hal-hal yang dapat dilaporkan terkait pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Paser triwulan pertama tahun 2026.

Tanah Grogot, 14 April 2026

Kepala Badan Kesbangpol



Nonding, S.Sos,M.M
Pembina Utama Muda/IVC
NIP. 19710607 199703 1 007

Lampiran :

1. **Undangan Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan !**
2. **Daftar Hadir Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I**
3. **Notulen Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan 1**
4. **Dokumentasi Rapat Evaluasi kinerja trwiwulan I**

1. Undangan Rapat Evaluasi Renja Triwulan I

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa KM.5 Gedung F Lantai 2
Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kode Pos 76211
Website : https://kesbangpol.paserkab.go.id E-mail: kesbangpol_paser@yahoo.com

Tana Paser, 13 April 2026

Nomor : B.900/ 18 /BKBP-PK/IV/2026
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Evaluasi dan Monitoring Renja Triwulan I tahun 2026

Yth. 1. Sekertaris
2. Plh. Krpala BidangWawasan kebangssan
3. Plh. Kepala Bidang Wasnas
4. Kepala Bidang Poldagri
5. JF. Analis Kebijakan Ahli Muda
6. JF. Perencana Ahli Muda
7. JF Perencana Ahli Pertama
8. ASN dan PPPK masing – Masing Bidang

Di - Tana Paser

Dalam rangka Evaluasi dan Monitoring Renja Triwulan I pada badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2026 maka Perlu Dilakukan Koordinasi dan Evaluasi Serapan Anggaran Tahun 2026 .

Berkenaan dengan har tersebut diatasengan ini Kami mengundang Bapa / Ibu semua untuk dapat hadir pada :

Hari	: SELASA
Tanggal	: 14 April 2026
Jam	: 09.00 s/d Selesai
Tempat	: Ruang rapat Kesabangpol kab. Paser
Kegiatan	: rapat Evaluasi dan Monitoring Renja Triwulan I Tahun 2026

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan atas kerja samanya diucapakan terima kasih.

Kepala,

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

Nomding, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda/IV.C

RAPAT MONITORING EVALUASI ANGGARAN / KINERJA UNTUK TRIWULAN 1 TAHUN 2026

HARI/TANGGAL : SELASA, 14 APRIL 2026
PUKUL : 16.00 WITA S.D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT BAKESBANGPOL KAB. PASER

NO	NAMA	UTUSAN	TANDA TANGAN
1	[illegible]	Kaban	1
2	Hatimah	Sekretaris	2
3	A. Hartono	Poldagri	3
4	Sulaiman	Wasbang	4
5	[illegible]	Polsosbud Ormas	5
6	Hanun A	Perencanaan	6
7	Julianty. S	perencanaan	7
8	Wahyu Rita	Wasbang	8
9	Ulmi Rokhmatullaili	Wasbang	9
10	Sri Wahdaningsih	Sekretariat	10
11	Syarfiah	Sekretariat	11
12	Norwahidah	Sekretariat	12
13	Shafa tasya Azalia	Sekretariat	13
14	Ahmad Hamidy	Polmas	14
15	Arbain DH	Perencanaan	15
16	Normalidas	Perlindungan	16
17	Ali Kurniawan. S	Wasnas	17
18	Syarif	Wasnas	18
19			19
20			20

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

HATIMAH , S.Sos, M.Si
NIP. 19681224 199002 2 001

3. Notulen Rapat Evaluasi dan Monitoring Renja Triwulan I Tahun 2026

NOTULEN RAPAT

ACARA/RAPAT : RAPAT EVALUASI DAN MONITORING RENJA TRIWULAN I TAHUN 2026

HARI/TANGGAL : SELASA, 14 APRIL 2026

TEMPAT : RUANG RAPAT KABAN KESBANGPL KAB. PASER

WAKTU : 16.00 S/D SELESAI

PIMPINAN RAPAT : KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. PASER

NOTULIS RAPAT : JF. PERENCANA AHLI MUDA

AGENDA RAPAT :

1. Pembukaan Rapat oleh Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Polittik Kab. Paser
2. Kemudian Sekretaris menyampaikan Agenda Rapat tentang Pengendalin dan Evaluasi Renja untuk Trwulan I TA.2026 dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasinya , dimana hasil dari kegiatan Evaluasi renja ini terdapat pada Form 80. Dan Laporan Realisasi Dan Keuangan Sampai dengan Bulan Maret 2026
3. Rapat dihadiri oleh Sekretaris, JF. Perencana Ahli pertama dan muda, Kasubbag Umum dan kepagawaian dan seluruh Kabid serta JF.Analis Kebijakan Ahli Muda dan ASN dan PPPK pada Sub. Bidang masing - masing pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Dari hasil diskusi dan Tanya Jawab dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut :
   a. Evaluasi Renja Triwulan I (Januari sampai dengan Maret) Tahun 2026, Dengan Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar 9.70 % atau Rp. 1.791.`88.184,- dari total Anggaran sebesar Rp. 18.486.870.179.
   b. Dari Realisasi Penyerapan Anggatan dapat Disimpulkan bahw Realisasi Kinerja untuk Triwulan ((Januari – Maret) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Belum dengan sesuai dengan Target Kinerja yang sudah ditentukan , selain itu dan masih ada kegiatan lain yang realisasinya masih rendah bahkan Nol (Nihil), hal ini disebabkan Pelaksanaan Kegiatan baru akan dimulai pada Triwulan ke II, III dan IV .
   c. Diharapkan untuk di tiwulan Berikutnya Kegiatan sudah bisa berjalan sesuai dengan Program , Kegiatan dan Sub. Kegiatan dan Pagu Anggaran yang telah tersedia pada DPA Badan Kesbangpol. Kab. Paser
5. Rapat Selesai pada Jam 17.30 dengan Kesepakatan Bersama bahwa, untuk Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Renja triwulan II, III dan IV ,Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser akan lebih meningkatkan Koordinasi dan Pengendalian pada Seluruh Bidang dan Sekretariat sehingga Realiasi Anggaran dan Kinerja dapat lebih ditingkatkan untuk mencapai target yang telah ditentukan .

Notulis rapat
JF. Perencana Ahli Muda

Hainun.A,SE
NIP.197607121996032004

4. Dokuntasi /Foto Rapat Evaluasi dan Monitoring Renja Trwiwulan I TA. 2026



Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kabupaten Paser
Periode Pelaksanaan : 2026

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD: 2025-2029
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatkan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara		Indeks Harmoni Indonesia																					
	1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																					
			Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	72.58	15,589,387,613.00	97.58	14,607,500,017.00		16,461,879,179.00									76.06						
	Meningkatnya Pelaksanaan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kinerja Manajemen Internal	76%	7,505,906,555.00	87.12%	6,335,361,598.00	103%	8,881,854,780.00	13.80	1,404,764,763.00	-	-	-	-	-	-	15.80	1,404,764,763.00	16.57	2,748,126,361.00	21.83	1.03	
	Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian serta Evaluasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kebijakan tahunan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	194,909,512.00	100%	159,903,445.00	100%	139,980,368.00	10.95	14,892,309.00	-	-	-	-	-	-	10.95	14,892,309.00	11.95	184,795,795.00	0.12	0.95	
			Persentase konsistensi Renja dengan Renstra tahun berkenaan	100																				
			Persentase konsistensi Renja dengan Renstra tahun berkenaan																					
			Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah	100																				
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Person)	3	85,229,513.00	3	91,648,843.00	3	56,460,000.00	2	11,474,690.00	0	-	0	-	-	-	2	11,474,690.00	5	103,123,533.00	1.67	1.21	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan satuan:Dokumen)	2	52,676,900.00	2	33,280,794.00	2	30,623,368.00	1	1,157,954.00	0	-	-	-	-	-	1	1,157,954.00	3	34,438,748.00			
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan satuan:Dokumen)	2	22,000,900.00	2	15,560,822.00	2	18,320,000.00	1	775,665.00	0	-	-	-	-	-	1	775,665.00	3	16,340,487.00			
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	35,030,900.00	4	28,412,867.00	4	30,600,000.00	2	1,440,000.00	0	-	-	-	-	-	2	1,440,000.00	6	30,852,867.00	1.50	0.88	
	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	100%	6,391,757,789.00	97%	5,588,691,410.00	97%	6,249,943,277.00	16.36	1,350,930,844.00	-	-	-	-	-	-	16.38	1,350,930,844.00	17.35	6,805,926,323.00	17.3	1.09	
			Persentase LHP Nihil	100%																				
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/Bulan)	35	6,267,585,604.00	35	5,397,556,523.00	35	8,150,262,000.00	35	1,329,458,004.00	0	-	0	-	0	-	35	1,329,458,004.00	71	6,727,025,537.00	1.97	1.07	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan satuan:Dokumen)	200	124,230,185.00	270	191,422,926.00	272	99,681,277.00	70	21,477,840.00	-	-	0	-	-	-	70	21,477,840.00	342	212,900,766.00	1.76	1.71	
	Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80 (Dengan Satuan:Persen)	90%	395,000,000.00		-	95%	116,335,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dengan Satuan:Paket)	36	110,000,000.00		-	36	44,000,000.00	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dengan satuan:Dokumen)	1	85,000,900.00		-	1	24,000,000.00	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dengan satuan:Dokumen)	1	50,000,900.00		-	1	19,965,300.00	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	7	150,900,000.00		-	5	28,579,000.00	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	
	Terlaksananya Bimtangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Dengan Satuan:Orang)	0	-		-			0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0	#DIV/0	

	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran (Dengan Satuan:Persen)	100%	382,343,253.00	96%	503,027,042.00	96%	296,733,835.90	12.17	36,122,830.00	-	-	-	-	-	-	-	12.17	36,122,830.00	13.13	539,149,872.00	13.1	1.41	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	3,003,000.00	1	2,303,030.00	1	3,003,000.00	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,303,001.90	1.00	0.77	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	32,842,253.00	2	171,352,930.00	2	29,573,035.20	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	2	171,352,931.80	1.00	5.22	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	45,000,900.00	2	50,070,819.00	2	30,700,000.90	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50,070,819.80	1.00	1.11	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	35,000,900.00	2	32,026,047.00	2	27,000,000.90	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	32,026,047.80	1.00	0.92	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	5,403,000.00	1	2,703,030.00	1	4,503,000.90	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,703,000.90	1.00	0.50	
	Terfasilitasinya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	1	1,000,000.00	4	3,375,000.00	4	1,000,000.90	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3,375,000.00	4.00	3.38	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	250,000,000.00	4	241,195,276.00	4	194,712,800.00	1	36,122,830.00	-	-	0	-	-	-	-	1	36,122,830.00	5	277,322,106.00	1.25	1.11	
	Terfasilitasinya Penatausahaan Aset Dinamis Pada SKPD	Penatausahaan Aset Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Aset Dinamis Pada SKPD(Dengan Satuan:Dokumen)	4	13,000,900.00		-	4	6,250,000.90	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	
	Meningkatnya inventaris barang milik daerah yang tercatat	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase inventaris barang milik daerah tercatat (Dengan Satuan:Persen)	100	20,000,900.00	100%	4,888,000.00	100%	10,000,000.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	4,888,000.00	0.0	0.24	
	Tersedianya Mobil	Pengadaan Mobil	Jumlah paket mobil yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	20,000,900.00	1	4,888,000.00	1	10,000,000.90	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,888,000.90	1.00	0.24	
	Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen)	100%	22,000,900.00	100%	20,672,185.00	100%	22,000,000.90	12.79	2,812,780.00	-	-	-	-	-	-	-	12.79	2,812,780.00	13.79	23,684,965.00	13.8	1.08	
	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	4	10,000,900.00	4	9,455,000.00	4	10,000,000.90	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9,455,001.90	1.00	0.95	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12,000,900.00	12	11,417,185.00	12	12,000,000.90	3	2,812,780.00	0	-	0	-	-	-	-	3	2,812,780.00	15	14,229,985.90	1.25	1.19	
	Meningkatnya barang inventaris dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)	100%	100,000,000.00	100%	47,681,466.00	100%	60,000,000.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	47,681,466.90	1.0	0.48	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	3	50,000,900.00	3	35,966,466.00	3	43,710,000.90	0	-	0	-						-	-	3	35,966,466.90	1.00	0.72	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	10	50,000,900.00	4	11,715,000.00	10	17,250,000.90	0	-	0							-	-	4	11,715,000.00	0.40	0.23	
	2. Meningkatnya Penanganan Konflik Ipoleksosbud di daerah		Persentase Konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan	100																						
	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KUALITAS KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Dengan Satuan:Persen)	100%	2,084,753,229.00	99%	3,250,088,360.00	100%	2,845,031,139.90		43,849,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	43,849,318.00	0.95	3,293,918,578.00	0.95	1.58	
	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan (Dengan Satuan : Persen)	100	2,084,753,229.05	99%	3,250,089,360.00	100%	2,845,031,139.90		43,849,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	43,849,318.00	0.95	3,293,918,578.90	0.0	1.58	
	Terlaksanannya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Diusun (Dengan satuan:Dokm)	50	100,000,000.00	2	151,193,070.00	3	39,966,600.90	0									-	-	2	151,193,070.90	0.04	1.51	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	25	100,000,000.00	99	503,355,069.00	25	41,685,661.90	0									-	-	90	503,355,069.90	3.60	5.03	
	Terfasilitasinya Pembentukan dan Pemantauan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Pemantauan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Pemantauan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Dengan Satuan:Keluarga)	40	184,753,229.00		-	40	30,000,000.00																
	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	100	1,600,000,000.00		2,595,524,121.00	100	2,673,376,878.90		43,849,318.00								-	43,849,318.00	-	2,639,373,439.90	0.00	-	
	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dengan Satuan:Dokumen)	1	100,001,001.00		-	1	60,000,000.90															

	Meningkatnya etika dan budaya politik	PROGRAM PENDIDIKAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PEMILIHAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik pada masyarakat dan kader partai politik (Dengan Satuan/persen)	1.60	2,355,851,490.00	100%	2,339,934,195.00	109%	5,368,073,705.90		167,770,435.00	-	-	-	-	-	-	-	167,770,435.00	1.00	2,507,704,630.90	0.62	1.08	
	Meningkatnya implementasi kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan (Dengan Satuan/Persen)	100	2,355,851,490.00	100%	2,339,934,195.00	109%	5,368,073,705.90		167,770,435.00	-	-	-	-	-	-	-	167,770,435.00	1.00	2,507,704,630.90	0.0	1.08	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan/Orang)	150	103,000,000.00	120	55,649,363.00	150	26,377,270.00									-	-	120	55,649,363.00	0.80	0.54	
	Terlaksannya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan/Orang)	100	2,100,000,000.00	105	2,196,789,813.00	100	4,066,810,050.90		143,653,507.00							-	143,653,507.00	105	2,340,443,320.90	1.05	1.11	
	Terlaksannya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan/Laporan)	2	113,851,490.00	3	67,495,015.00	2	20,648,091.90									-	-	3	67,495,015.00	1.50	0.76	
	Terlaksannya pengawasan pasiliraka	Pelaksanaan tugas Pasiliraka	Jumlah Laporan Kegiatan pelaksanaan Tugas Pasiliraka (Dengan satuan : Kegiatan)	2	40,000,000.00		-	4	1,273,934,344.00		24,126,928.00													
	Meningkatnya Kebaktian Organisasi Kemasyarakatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif (Dengan Satuan/persen)	15%	356,961,600.00	99%	353,550,750.00	102%	102,913,186.00	14.17	14,582,704.00	-	-	-	-	-	-	14.17	14,582,704.00	15.16	368,133,436.00	101.08	1.03	
	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan (Dengan Satuan/Persen)	100	356,961,600.00	99%	353,550,750.00	102%	102,913,186.00	14.17	14,582,704.00	-	-	-	-	-	-	14.17	14,582,704.00	15.16	368,133,436.00	0.2	1.03	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Hasilasi Sangketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Hasilasi Sangketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Hasilasi Sangketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Dengan Satuan/Orang)	200	156,961,600.00	289	242,685,929.00	200	56,705,386.90		14,313,904.00	0						-	14,313,904.00	289	351,003,833.80	1.45	1.62	
	Terlaksannya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Hasilasi Sangketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Hasilasi Sangketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Hasilasi Sangketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Dengan Satuan/Orang)	100	100,000,000.00	120	63,677,349.00	100	29,965,301.90		144,000.00	0						-	144,000.00	120	63,971,349.90	1.20	0.64	
	Terlaksannya Monitoring di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Hasilasi Sangketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Hasilasi Sangketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Hasilasi Sangketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Dengan Satuan/Laporan)	2	100,000,000.00	2	48,033,424.00	2	20,242,801.90		124,800.00	0						-	124,800.00	2	48,158,224.90	1.00	0.48	
	Meningkatnya kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	PROGRAM PENGENAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase kebijakan di Bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba , fasilitasi kerukunan umat beragama dan penginyat kepercayaan yang dilaksanakan (Dengan Satuan/Persen)	100%	1,389,817,770.00	65%	734,746,767.00	102%	90,003,000.90	2.13	1,930,800.00	-	-	-	-	-	-	2.13	1,930,000.00	2.79	736,668,767.00	2.79	0.80	

	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendukung kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan kebijakan di Bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika , fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan yang ditetapkan (Dengan Satuan:Persen)	Persentase Sosialisasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen)	100	1,289,817,770.00	69%	774,748,767.00	100%	90,000,000.00	2.13	1,920,900.00	-	-	-	-	-	-	2.13	1,920,000.00	2.79	776,668,767.00	0.0	0.01	
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			3	336,738,482.00			0		0	-	2	160,224,000		176,514,482	2.00	336,738,482.00	5	673,476,964.00	#DIV/0	#DIV/0	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakandi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dibuat (Dengan satuan : Orang)	150	150,000,000.00			3	30,000,000.00									-	-	-	-	0.00	-	
	Terlaksannya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	130	500,000,000.00	400	413,481,985.00	120	30,000,000.00		1,920,900.00							-	1,920,000.00	400	415,401,985.00	3.33	0.83	
	Terlaksannya Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	639,817,770.00	4	24,528,300.00	4	30,000,000.00									-	-	4	24,528,300.00	1.00	0.04	
	Meningkatnya penanganan potensi konflik sosial	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial (Dengan Satuan:Persen)	108%	1,956,097,769.00	74%	1,353,635,495.00	109%	1,143,897,369.00	13.84	158,108,964.00	-	-	-	-	-	-	13.84	158,303,964.00	14.58	1,712,136,459.00	14.58	0.86	
	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen)	100	1,956,097,769.00	74%	1,353,635,495.00	109%	1,143,897,369.00	13.84	158,108,964.00	-	-	-	-	-	-	13.84	158,303,964.00	14.58	1,712,136,459.00	0.15	0.86	
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			2	21,727,696.00			0		0	-						-	-	2	21,727,696.00	#DIV/0	#DIV/0	
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di diearah	Jumlah Kebijakan di Bidng Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah			2	72,632,685.00		-	0	-	0	-						-	-	2	72,632,685.00	#DIV/0	#DIV/0	
	Terlaksannya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksannya kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	75	269,000,000.00	20	76,450,018.00	75	60,000,000.00									-	-	20	76,450,018.00	0.27	0.29	
	Terlaksannya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini , Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	501	320,000,000.00	20	376,539,166.00	500	60,003,000.00									-	-	20	376,539,166.00	0.04	1.18	

	Terlaksananya Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan/Laporan)	4	380,070,033.33	5	167,750,086.00	4	97,795,600.00									-	-	5	167,750,086.00	1.25	3.48	
	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan/Dokumen)	4	1,064,997,768.80	2	836,735,840.30	4	966,097,799.00	1	158,306,964.00							1.30	158,306,964.00	3	997,036,804.00	0.75	0.94	
									Rata-rata capaian kinerja (%)							9.70	1,795,188,184				6.17	
									Predikat Kinerja							Sangat Rendah						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : kegiatan selanjutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya :

Disusun
Tanah Grogot,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Paser

Nonding, S.Sos, M.M
NIP. 19710607 199703 1 007

Dievaluasi
Tanah Grogot,
Kepala Bappedalitbang
Kab. Paser

Rustian Nor, SE, M.Si
NIP. 19770308 199803 1 004

LAPORAN REALISASI KEUANGAN

OPD : 8.01.0.00.0.00.00.0000 - **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Kondisi sampai dengan : 31 Maret 2026

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan /Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Target		Pagu	Bobot	Perubahan/Pergeseran			Sisa Anggaran
							Realisasi Keuangan		Fisik	
							Rp.	%	%	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	8.01.0.00.0.00.00.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			18.461.870.179	100,00	1.791.188.184	9,70	9,70	16.670.681.995
2	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.891.954.780	48,16	1.404.764.763	15,80	7,61	7.487.190.017
3	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			135.980.368	0,74	14.892.309	10,95	0,08	121.088.059
4	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	56.460.000	0,31	11.474.690	20,32	0,06	44.985.310
5	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	30.620.368	0,17	1.197.954	3,91	0,01	29.422.414
6	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	18.300.000	0,10	779.665	4,26	0,00	17.520.335
7	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	30.600.000	0,17	1.440.000	4,71	0,01	29.160.000
8	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.249.943.277	44,69	1.350.936.844	16,38	7,32	6.899.006.433
9	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38	Org/Bulan	8.150.262.000	44,15	1.329.459.004	16,31	7,20	6.820.802.996
10	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200	Dokumen	99.681.277	0,54	21.477.840	21,55	0,12	78.203.437
11	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			116.335.300	0,63	-	0,00	-	116.335.300
12	8.01.01.2.05.0002	Pengadaaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	36	Paket	44.000.000	0,24	0	0,00	-	44.000.000
13	8.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	24.000.000	0,13	0	0,00	-	24.000.000
14	8.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	19.965.300	0,11	0	0,00	-	19.965.300
15	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5	Orang	28.370.000	0,15	0	0,00	-	28.370.000
16	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			296.735.835	1,61	36.122.830	12,17	0,20	260.613.005
17	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	3.000.000	0,02	0	0,00	-	3.000.000
18	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Paket	29.573.035	0,16	0	0,00	-	29.573.035
19	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2	Paket	30.700.000	0,17	0	0,00	-	30.700.000
20	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2	Paket	27.000.000	0,15	0	0,00	-	27.000.000
21	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Dokumen	4.500.000	0,02	0	0,00	-	4.500.000
22	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	1.000.000	0,01	0	0,00	-	1.000.000
23	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	194.712.800	1,05	36.122.830	18,55	0,20	158.589.970
24	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Dokumen	6.250.000	0,03	0	0,00	-	6.250.000
25	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10.000.000	0,05	-	0,00	-	10.000.000
26	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1	Unit	10.000.000	0,05	0	0,00	-	10.000.000
27	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			22.000.000	0,12	2.812.780	12,79	0,02	19.187.220
28	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	10.000.000	0,05	0	0,00	-	10.000.000
29	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	12.000.000	0,06	2.812.780	23,44	0,02	9.187.220
30	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			60.960.000	0,33	-	0,00	-	60.960.000
31	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	Unit	43.710.000	0,24	0	0,00	-	43.710.000
32	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	Unit	17.250.000	0,09	0	0,00	-	17.250.000
33	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			2.845.031.139	15,41	43.849.318	1,54	0,24	2.801.181.821
34	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			2.845.031.139	15,41	43.849.318	1,54	0,24	2.801.181.821

35	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3	Orang	39.968.600	0,22	0	0,00	-	39.968.600
36	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	25	Orang	41.685.661	0,23	0	0,00	-	41.685.661
37	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	40	Keluarga	30.000.000	0,16	0	0,00	-	30.000.000
38	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	100	Orang	2.673.376.878	14,48	43.849.318	1,64	0,24	2.629.527.560
39	8.01.02.2.01.0010	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1	Dokumen	60.000.000	0,32	0	0,00	-	60.000.000
40	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			5.388.073.705	29,18	167.770.435	3,11	0,91	5.220.303.270
41	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan			5.388.073.705	29,18	167.770.435	3,11	0,91	5.220.303.270
42	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150	Orang	26.377.270	0,14	0	0,00	-	26.377.270
43	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100	Orang	4.066.910.000	22,03	143.653.507	3,53	0,78	3.923.256.493
44	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2	Laporan	20.848.091	0,11	0	0,00	-	20.848.091
45	8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka	4	Kegiatan	1.273.938.344	6,90	24.116.928	1,89	0,13	1.249.821.416
46	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			102.913.186	0,56	14.582.704	14,17	0,08	88.330.482
47	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			102.913.186	0,56	14.582.704	14,17	0,08	88.330.482
48	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200	Orang	56.705.386	0,31	14.313.904	25,24	0,08	42.391.482
49	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100	Orang	25.965.000	0,14	144.000	0,55	0,00	25.821.000
50	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2	Laporan	20.242.800	0,11	124.800	0,62	0,00	20.118.000
51	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			90.000.000	0,49	1.920.000	2,13	0,01	88.080.000
52	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			90.000.000	0,49	1.920.000	2,13	0,01	88.080.000
53	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3	Orang	30.000.000	0,16	0	0,00	-	30.000.000
54	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	120	Orang	30.000.000	0,16	1.920.000	6,40	0,01	28.080.000
55	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4	Laporan	30.000.000	0,16	0	0,00	-	30.000.000
56	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			1.143.897.369	6,20	158.300.964	13,84	0,86	985.596.405

57	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			1.143.897.369	6,20	158.300.964	13,84	0,86	985.596.405
58	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	75	Orang	60.000.000	0,32	0	0,00	-	60.000.000
59	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500	Orang	60.000.000	0,32	0	0,00	-	60.000.000
60	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	4	Laporan	57.799.600	0,31	0	0,00	-	57.799.600
61	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4	Dokumen	966.097.769	5,23	158.300.964	16,39	0,86	807.796.805
		TOTAL			18.461.870.179	100,00	1.791.188.184	9,70	9,70	16.670.681.995